



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online  
(ePaper)*

SUBJEK

EKONOMI

Kamis, 12 September 2024

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN  
Perpustakaan  
2024**

## **Daftar Isi**

1. FONDASI KUAT ANGGARAN BENTUK KEMENTERIAN BARU – *Media Online Bisnis Indonesia*
2. ANGGARAN PUSAT LEBIH DOMINAN DARIPADA DAERAH – *Media Online Kontan*
3. DALAM EMPAT TAHUN, RI MAMPU NAIKKAN PERINGKAT PENCAPAIAN SDGs – *Media Online Investor Daily*

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024

| TRANSISI PEMERINTAHAN |

## FONDASI KUAT ANGGARAN BENTUK KEMENTERIAN BARU

Bisnis, JAKARTA — Realisasi pembentukan kementerian dan lembaga baru era pemerintahan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto diyakini berjalan mulus seiring dengan dukungan fondasi kuat dari sisi anggaran dan payung hukum.

Annasa Rizki Kamalina  
annasa.kamalina@bisnis.com

**W**akil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan kepada pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung rencana pembentukan Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dengan persiapan tersebut, lanjutnya, apabila kebijakan pembentukan kementerian/lembaga baru nantinya dilaksanakan oleh pemerintah Prabowo, maka bisa langsung dilakukan karena anggarannya sudah tersedia.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ujar Thomas dalam *Media Briefing* di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dia menambahkan, terkait dengan rencana pembentukan K/L baru tahun depan teknisnya sedang dilakukan harmonisasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri).

"Itu semua sudah dikordinasikan dalam hal ini Kemendagri sudah melakukan harmonisasi dengan Kementerian PAN-RB," lanjutnya.

Melihat komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatrata sebelumnya menyampaikan

kas negara telah mengantisipasi program pemerintahan baru. Anggaran untuk kebijakan tersebut berada dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang dialokasikan senilai Rp491,23 triliun. Nilai tersebut masuk dalam pos Belanja Non-K/L yang

secara total senilai Rp1.541,36 triliun.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang akan membentuk Kementerian Perumahan, yang akan dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Di samping pemisahan Kementerian PU dan PR, pemerintahan baru juga berencana membentuk Badan Pemerimaan Negara, hingga Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon.

Rencana pembentukan kementerian/lembaga baru era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang ditempuh dengan melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Jumlah kementerian tidak akan dibatasi lagi dalam revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara guna memuluskan rencana pemerintahan mendatang membentuk badan baru yang bertanggung jawab langsung pada presiden.

UU Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 15, saat ini mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Namun, dalam draf RUU Kementerian Negara yang sedang dibahas Badan Legislatif

**Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.**

### Profil Beberapa Instansi Baru Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

**Kementerian Perumahan**  
• Saat ini tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
• Pernah terbentuk periode 2004-2016

**Badan Pemerimaan Negara**  
• Mencakup Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Anggaran PNPB  
• Isu pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan muncul sejak 1999

**Dana Investasi Nasional**  
• Berbentuk seperti *sovereign wealth fund*  
• Saat ini fungsi telah dijalankan oleh Indonesia Investment Authority (INA)

**Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon**  
• Instansi baru

**Badan Gizi Nasional**  
• Instansi baru  
• Telah dibentuk dengan landasan Perpres No. 83/2024

**"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran."**

DPR dan pemerintah, pasal 15 akan berbunyi, "Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan." Artinya, presiden ke depan bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan keinginannya tanpa batasan jumlah.

"Perubahan pasal ini bertujuan untuk mempermudah kinerja presiden sesuai visi-misinya," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek dalam rapat Panitia RUU Perubahan UU Kementerian Negara, Senin (9/9). Baleg juga mengusulkan untuk menyisipkan pasal baru soal

**Pembentukan K/L baru tahun depan pun telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri).**

**Kas negara telah mengantisipasi program-program pemerintahan baru.**



fleksibilitas kewenangan Presiden untuk memecah organisasi dalam Kementerian tertentu.

Awiek mengatakan pasal itu bakal disisipkan di antara pasal 10 dan pasal 11 RUU Perubahan UU Kementerian Negara. Pada akhirnya, pasal itu akan memberikan kewenangan terhadap presiden untuk merombak kementerian, termasuk memecah lembaga dalam kementerian tertentu.

Pasal 10 A yang diusulkan DPR berbunyi, dalam hal terdapat undang-undang yang mengatur/mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

"Jika terdapat penulisan organisasi berupa Direktorat Jenderal, maka Ditjen ini bisa diubah menjadi organisasi dalam kelembagaan tersendiri atau bersama," sebut Awiek.

Dia memberi contoh Kementerian Lingkungan Hidup yang bergabung dengan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, proses merger itu bisa dipersingkat melalui aturan ini. "Kita jangan sampai mengulang kejadian yang waktu itu tidak efektif itu terulang pada pemerintahan yang akan datang. Kita niatnya untuk memperbaiki," ujarnya.

### TAK BAHAS KABINET

Pada perkembangan lain, Wamenkeu II Thomas Djiwandono meng-

ungkap isi pertemuannya bersama dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (9/9).

Menanggapi pertemua-

nya wartawan terkait ada atau tidaknya pembahasan mengenai keberlanjutan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo mendatang, Thomas menyampaikan tidak ada pembahasan tersebut.

"Tidak ada [tawaran]. Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN," ungkapnya dalam Media Briefing, Rabu (11/9).

Thomas menyampaikan dalam pertemuannya tersebut, hanya membahas seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan RAPBN 2025.

"Karena ini masa transisi, Ibu Menkeu merasa perlu memberikan presiden terpilih saat ini posisi-posisi APBN Kita di

3 bulan terakhir," jelasnya.

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemendagri Isa Rachmatrata, Selasa (10/9), di DPR, terdapat penyesuaian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanjanya mencapai Rp3.621,31 triliun. Sementara itu, dalam Rapat Panitia BPP bersama Badan Anggaran (Banggar), Belanja Pemerintah Pusat direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, senilai Rp1.160,09 triliun di antaranya merupakan belanja K/L.

Angka tersebut nyatanya merupakan penyesuaian dari rencana belanja K/L sebelumnya yang senilai Rp1.094 triliun. "Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih," ungkapnya.

### Sejarah Jumlah Kementerian Era Reformasi di Indonesia

Kabinet	Presiden	Jumlah
Reformasi Pembangunan	B.J. Habibie	39
Persatuan Nasional	Abdurrahman Wahid	37
Gotong Royong	Megawati Soekarnoputri	33
Indonesia Bersatu	Susilo Bambang Yudhoyono	36
Indonesia Maju	Joko Widodo	34

### Rancangan Postur Fiskal 2025 (triliun)

Keterangan	APBN 2024	Outlook 2024	RAPBN 2025
Pendapatan Negara	2.802,3	2.802,5	2.996,9
- Perpajakan	2.309,9	2.218,4	2.490,9
- PNPB	492,0	549,1	505,4
- Hibah	0,4	34,9	0,6
Belanja Negara	3.325,1	3.412,2	3.613,1
- Belanja Pusat	2.467,5	2.558,2	2.693,2
- Transfer ke Daerah	857,6	854,0	919,9
Keseimbangan Primer	(25,2)	(110,8)	(63,3)
Defisit	(522,8)	(609,7)	(616,2)
- % PDB	(2,29)	(2,70)	(2,53)
Pembiayaan Anggaran	522,8	609,7	616,2

## Anggaran Pusat Lebih Dominan daripada Daerah

Dalam empat tahun terakhir, anggaran belanja modal pemerintah pusat lebih besar dari daerah

Siti Masitoh,  
Shifa Nur Fadilla

JAKARTA. Anggaran pembangunan di daerah tak sebesar anggaran pusat. Hal ini telah terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bahkan komposisi anggaran itu berpotensi terjadi di tahun pertama pemerintahan baru.

Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), proporsi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lima tahun terakhir berfluktuasi. Selama periode 2019 hingga 2024, rerata proporsi anggaran belanja K/L mencapai 39,07% dari total belanja negara.

Sementara di 2025, dalam Postur Sementara yang disepakati pemerintah dan DPR, anggaran belanja K/L dipatok sebesar Rp 1.160,09 triliun, atau 32,12% dari alokasi belanja negara tahun depan sebesar Rp 3.613,05 triliun.

Artinya ada penurunan alokasi belanja K/L di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibandingkan selama lima tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan anggaran belanja di RAPBN 2025 telah memperhitungkan rencana penambahan K/L oleh pemerintahan Prabowo. Namun ia belum menyebutkan jumlahnya. Di sisi lain, rerata proporsi anggaran TKD periode 2019-2024 mencapai 27,44% dari total belanja negara. Sementara proporsi TKD tahun depan mencapai 25,46%. Artinya, anggaran K/L masih lebih besar dibanding TKD.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, besarnya porsi anggaran K/L menggambarkan belanja birokrasi masih lebih besar dibandingkan belanja daerah.

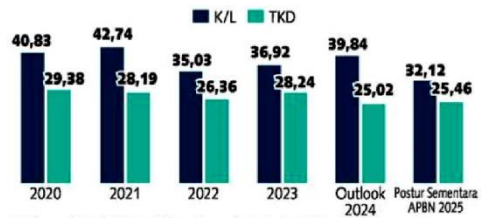
Untuk melihat orientasi pembangunan, maka perlu dilihat perbandingan belanja modal antara pusat dan daerah. Dari data Kemkeu, alokasi belanja modal pusat pada 2019 dan 2020 masih lebih rendah dibandingkan belanja modal daerah. Namun pada 2021-2024, justru sebaliknya (lihat grafik).

Direktur Eksekutif Komite

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand N Suparman menyebutkan, lebih besarnya anggaran belanja modal pemerintah pusat dibanding daerah menjadi kabar buruk. Pasalnya, anggaran pembangunan daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. "Sekitar 70% bahkan 80% pendapatan daerah dari dana transfer daerah," kata dia, Rabu (11/9). Dengan anggaran daerah yang lebih rendah, kata Armand, maka ruang fiskal daerah semakin sempit.

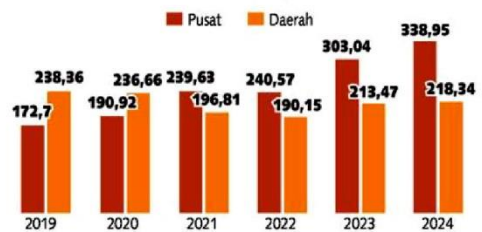
Armand mengakui, saat pandemi Covid-19, pemerintah memfokuskan anggaran untuk pemulihan. Oleh sebab itu, anggaran sosial pun diperbesar hingga muncul anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia berharap, pemerintahan baru kembali mempertimbangkan anggaran TKD ke depan. Dengan besarnya anggaran K/L di 2025, pihaknya khawatir pemerintah memangkas dana daerah. "Kalau seandainya ada yang dipotong dari TKD, ini tentu merugikan daerah," tandas Armand.

Proporsi Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah (%)



Ket: Proporsi belanja K/L dan TKD masing-masing terhadap total belanja negara per tahun

Anggaran Belanja Modal Pusat dan Daerah (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

# INVESTOR DAILY

INDONESIA

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024

## Dalam Empat Tahun, RI Mampu Naikkan Peringkat Pencapaian SDGs

**JAKARTA, ID** – Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan *keynote speech* secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner, Rabu (11/9/2024).

Airlangga menjelaskan, Indonesia

terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejak peluncuran SDGs pada 2015. Lebih lanjut, SDGs berisi 17 *goals* dan terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi. Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan

baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi. Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga program *cash for work*. **(th)**

Halaman; 7 - Kolom; Macro Economics